

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
DAN EKONOMI WILAYAH (PISEW) TERHADAP
KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

MUNIS FATIN KHASANAH

NIM : G01217015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munis Fatin Khasanah

NIM : G01217015

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi

Judul Skripsi : Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan
Ekonomi Wilayah (PISEW) Terhadap Kemajuan
Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian /karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2021

Saya menyatakan

Munis Fatin Khasanah

NIM: G01217015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Munis Fatmahan Khasanah NIM (G01217015) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Maret 2021

Pembimbing



Ana Toni Roby Candra Yudha M.SEI

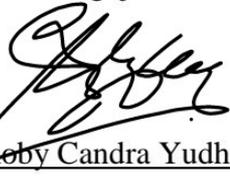
NIP:2016603311

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Munis Fatim Khasanah NIM. G01217015 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu, 31 Maret 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Pogram Studi Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP.201603311

Penguji II



Hj. Nurrahmah, SE.MM
NIP.196205222000032001

Penguji III



Hapsari Wiji Utami, M.SE
NIP.198603082019032012

Penguji IV



Abdullah Kafabih, M.SE
NIP.199108072019031006

Surabaya, 31 Maret 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Ah Ali Arifin, MM
NIP.196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Munis Fatim Khasanah
NIM : G01217015
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : fkmunis10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI
WILAYAH (PISEW) TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KABUPATEN BOJONEGORO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Maret 2021

Penulis


(Munis Fatim Khasanah)

berpengaruh terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi yang kemudian akan menyebabkan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah maupun negara.

Salah satu penghambat dari pembangunan infrastruktur terletak pada anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Tanpa ada alokasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah maka pembangunan yang hanya direncanakan tidak akan terwujud. Perlu diketahui bahwa keadaan infrastruktur yang ada di Indonesia masih dikatakan tertinggal dari negara-negara lain. Bahkan dalam lima tahun terakhir ini sejumlah infrastruktur jalan, jembatan, transportasi umum gencar-gencarnya dilakukan pembangunan, namun semua itu masih belum berhasil menyetarakan dengan negara-negara Asia lainnya. Mengingat permasalahan tersebut, pemerintah terus meningkatkan pengalokasian dana APBN untuk pembangunan infrastruktur pada seluruh wilayah di negaranya.

Pemerintah merupakan penggerak bagi suatu wilayah, pemerintah memiliki peran penting terhadap kesejahteraan seluruh rakyatnya. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus membuahkan hasil bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, agar suatu negara tidak mengalami ketertinggalan dari negara lain. Dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat terutama pada wilayah pedesaan adalah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, karena mengingat pentingnya hal tersebut untuk diperoleh.

			serta tidak adanya koordinasi antara pihak kontraktor dengan pemerintah dan banyak masyarakat yang masih meminta ganti rugi atas lahan yang telah digunakan.	
4.	<p><i>Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat</i></p> <p>Christin Dessy Sahudege, Burhanuddin Kiyai, dan Alden Laloma</p>	<p>Penelitian tersebut menghasilkan, implementasi kebijakan pembagunan infrastruktur di Kabupaten Sorong telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada masyarakat yang belum direspon pendapatnya, namun harapan dari masyarakat serta pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan maupun pembangunan ekonomi masyarakat telah adanya peningkatan yang mana sudah dibangunnya pasar-pasar serbaguna maupun permanen sehingga hal tersebut sedikit banyak telah berpengaruh dalam kemajuan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah melaksanakan dengan baik kebijakan untuk pengembangan ekonomi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sorong. Adanya pembangunan pasar permanen dan pasar serbaguna agar masyarakat tidak berjualan dengan jarak tempuh kejauhan dari tempat tinggal mereka. Untuk pembangunan jalan di Kecamatan Sorong pun sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, namun dari hasil penelitian masih ada sebagian ruas jalan yang belum ditangani oleh dinas Pekerjaan Umum.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah, tempat/objek yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, untuk penelitian yang sekarang di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur</p>

6.	<p><i>Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi Pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda</i></p> <p>Warsilan dan Akhmad Noor</p>	<p>Dalam penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwasanya pentingnya infrastruktur kesehatan pada kota Samarinda. Infrastruktur kesehatan, infrastruktur pelayanan air, serta infrastruktur jalan dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur kesehatan yang memadai maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah yang pertama adalah peningkatan penyerapatn tenaga kerja melalui penambahan panjang jalan, serta yang kedua untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan fasilitas jalan, untuk yang ketiga dalam</p>	<p>Pembahasan dari penelitian ini adalah 1) penggunaan 4 uji dalam penganalisisan data, yaitu uji kenormalan, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas serta uji multikolinearitas. 2) penggunaan model AHP untuk memperoleh informasi terkait kebijakan dari pemerintah, dimana peneliti ini mengambil data dari Bappeda Kota Samarinda. 3) sasaran dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu dengan cara penambahan panjang jalan, dengan dilakukan kegiatan ini dapat menyerap tenaga kerja (masyarakat) sekitar. 4) adanya sasaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti menambah fasilitas jalan. 5) adanya sasaran dalam mengurangi angka kemiskinan.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitiannya dan objek lokasinya. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis kuantitatif dengan model analisis pengujian dan lokasi di Kota Samarinda. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis wawancara serta observasi serta dideskripsikan menurut data yang ada.</p>
----	---	--	---	---

1. Kebijakan

Kebijakan adalah sesuatu usaha dalam mencapai tujuan tertentu dan dengan sasaran tertentu. Kemudian kebijakan pemerintah merupakan aturan atau keputusan yang telah dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang pastinya menyangkut kepentingan umum. Adanya kebijakan pemerintah ini yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh haknya.

2. Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

Infrastruktur merupakan semua jenis fasilitas yang pasti dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan baik kegiatan sosial maupun ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur sering kali disebut dengan bangunan, jalan, transportasi maupun pasokan listrik. Semakin terpenuhinya infrastruktur suatu wilayah maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun sebaliknya, keterbatasan infrastruktur di suatu wilayah maka semakin sulit pula wilayah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu infrastruktur ekonomi yaitu infrastruktur berupa aset fisik yang akan menunjang segala aktivitas ekonomi masyarakat, infrastruktur sosial, merupakan jenis infrastruktur pendukung dari infrastruktur sosial, serta infrastruktur institusi atau kebijakan dari pemerintah.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan dari pendapatan per kapita serta kemajuan teknologi dari suatu wilayah. Adapun faktor yang

Penelitian ini merupakan penelitian jenis metode Kualitatif, yaitu dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan menggunakan jenis studi kasus yaitu penelitian yang memperhatikan semua aspek terpenting dari suatu kasus yang akan diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian studi kasus ini dapat mempermudah peneliti dalam menyampaikan suatu gambaran yang lebih detail mengenai situasi atau objek. Berikut ciri utama yang biasa terdapat dalam penelitian studi kasus ini. Yaitu:

- a. Penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai suatu permasalahan seperti masalah sosial, keadaan masyarakat, keadaan individu dan keadaan lingkungan dan tetap memperhatikan semua aspek yang dianggap penting dalam suatu permasalahannya, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail.
- b. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini maka peneliti dapat memahami dan menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukannya
- c. Bersifat heuristik yang artinya dengan menggunakan penelitian studi kasus dapat menjelaskan alasan terhadap suatu masalah atau isu.
- d. Pada penelitian jenis studi kasus membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

Peneliti yang menggunakan metode penelitian pendekatan studi kasus dengan tujuan dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pemahaman dan konsep-konsep yang diperoleh, serta dapat menyampaikan suatu gambaran

1. *Communication*, dengan adanya komunikasi maka penyebarluasan informasi dari segala arah menjadi lancar. Namun dalam penyampaian informasi tersebut harus secara jelas dan penuh ketelitian agar tidak terjadi simpang siur informasi.
2. *Resources*, sumber daya yang dimaksudkan disini adalah implementator dari kebijakan yang telah di keluarkan, karena sumber daya ini sangatlah penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Jika kurang adanya sumber pendukung dalam implementasi kebijakan maka tidak akan efektif proses kebijakan yang telah disusun. Selanjutnya, sumber daya tersebut harus tersedia dengan cukup, sumber daya tersebut harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan kebijakan, memiliki informasi yang kuat untuk kebutuhan data, serta dukungan dari lingkungan untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan.
3. *Dispotisions or attitude*, dalam hal ini artinya sikap dari implementator dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Implementator harus memiliki banyak inisiatif agar berhasil dalam menjalankan kebijakan.
4. *Bureaucratic structure*, artinya tahapan birokrasi memiliki keterkaitan erat dalam kebijakan baik antara lembaga yang sama maupun lembaga yang berbeda, sehingga sangat diperlukan koordinasi yang efektif.

Kebijakan pemerintah dalam halnya pembangunan ekonomi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, dengan adanya keberhasilan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam suatu wilayah maka akan berpengaruh juga pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Kebijakan ini

Kemudian kategori infrastruktur yang ketiga, yang mana kategori ini hanya sistem pendukung dalam pengembangan infrastruktur ekonomi dan sosial yaitu infrastruktur administrasi, dalam infrastruktur ini didalamnya terdapat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung, yaitu berupa penegakan hukum, kontrol administrasi serta koordinasi.

3. Peran Infrastruktur

Sistem infrastruktur berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena hal tersebut menjadi salah satu pendukung utama pada sistem sosial dan sistem ekonomi kehidupan mereka. Fungsi dari infrastruktur ini yaitu sebagai mediator pada sistem sosial dan sistem ekonomi yang dapat berpengaruh nantinya untuk tatanan hidup masyarakat serta lingkungannya. Selanjutnya untuk lingkungan alam memiliki peran sebagai pendukung dalam sistem infrastruktur. Pada hakekatnya sistem infrastruktur merupakan pendukung dari sistem ekonomi, sedangkan sistem ekonomi merupakan pendukung dari sistem sosial masyarakat.

Tersedianya infrastruktur dalam suatu wilayah merupakan pengaruh terbesar bagi perkembangan wilayah tersebut, hal tersebut merupakan ciri-ciri dari meningkatnya laju pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika suatu wilayah terdapat atau memiliki infrastruktur sosial dan ekonomi yang memadai, maka wilayah tersebut akan mengalami laju pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih baik, akan tetapi jika suatu wilayah tidak memadai infrastrukturnya maka wilayah tersebut akan mengalami perlambatan dalam laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini terbukti bahwa infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam suatu

2. Terdapat unsur kerangka perencanaan pembangunan pada tataran makro.
Dalam unsur ini akan dihubungkan beberapa variabel pembangunan beserta implikasi dari hubungan variabel dengan tataran makro tersebut.
3. Terdapat unsur perencanaan sumber-sumber dalam pembangunan, sumber-sumber ini khususnya dalam hal pembiayaan. Masalah keterbatasan sumber pembiayaan sering kali terjadi pada setiap Negara apalagi NSB.
4. Terdapat uraian dalam hal kerangka kebijakan, kerangka kebijakan ini meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan dalam penganggaran, kebijakan harga serta kebijakan-kebijakan sektoral lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu dirumuskan agar dapat diimplementasikan selanjutnya.
5. Perencanaan pembangunan merupakan program investasi yang didalamnya dilakukan secara sektoral. Dalam menyusun program investasi secara sektoral ini dilakukan secara bersama-sama dengan rencana-rencana yang menjadi sasaran.
6. Perencanaan pembangunan merupakan administrasi pembangunan yang menjadi pendukung dalam usaha perencanaan serta pelaksanaan adanya pembangunan.

Setelah dilakukannya serangkaian perencanaan oleh pemerintah maka dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Oleh sebab itu peran pemerintah disini dapat berpengaruh besar dalam berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilaksanakan. Namun sebaliknya jika pemerintah terlalu acuh dan tidak adanya kebijakan terkait

2. Sekretariat, dalam bidang sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang sekretariat ini dibagi menjadi 3 sub bagian, yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan serta sub bagian program dan laporan. Tugas pokok dari bidang sekretariat adalah merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengurus perlengkapan dan mengendalikan berbagai kegiatan administrasi umum, kepegawaian, bagian perlengkapan, penyusunan program serta melakukan pelaporan dan keuangan.
3. Bidang Tata Bangunan, dalam bidang tata bangunan ini terdapat 2 seksi, yaitu seksi bagian pembangunan gedung dan seksi pemantauan, pengendalian serta rehabilitasi gedung. Tugas pokok dari bidang tata bangunan ini adalah merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang tata bangunan, seperti halnya membuat program-program pembangunan, melakukan survey dalam pembangunan yang akan dijalankan dan lain sebagainya.
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dalam bidang ini terdapat 2 seksi, yaitu seksi air bersih dan sanitasi dan seksi pengembangan prasarana, sarana lingkungan. Adapun tugas pokok dari bidang prasarana, sarana dan utilitas umum adalah merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam urusan bidang pertanahan, permukiman, perumahan, dan kawasan permukiman. Dari tugas pokok tersebut maka fungsi pokok dari bidang ini seperti penyelesaian sengketa pertanahan, merumuskan kebijakan teknis penatausahaan pertanahan, merencanakan pembangunan sarana

perencanaan tata ruang, pemanfaatannya, serta untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam susunan organisasi, tugas dan fungsi organisasi serta kedudukan dinas ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020. Dalam susunan organisasi DPU Bina Marga dan Penataan Ruang terdapat sub-sub bagian terpenting, yaitu sub bagian urusan jalan, sub bagian urusan jasa konstruksi serta sub bagian penataan ruang. Untuk susunan organisasi dan tugas pokok dari Dinas tersebut adalah:

1. Ketua Dinas, adalah kepala yang memimpin Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, yang bertugas dibawah langsung Bupati Bojonegoro serta bertanggung jawab penuh kepada sekretaris daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Sekretaris, terdapat 2 sub bagian di dalam kesekretariatan yaitu sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan serta sub bagian program dan laporan. Tugas pokok dari sekretariat ini adalah merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan dan mengahandle keuangan.
3. Bidang Bina Marga I, di dalam bidang ini terdapat 3 seksi pembantu, yaitu seksi bagian jalan I, seksi bagian jembatan I serta seksi bagian prasarana jalan I. Pada bidang ini memiliki tugas pokok yaitu merencanakan program pembangunan jalan yang nantinya dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan atau produksi dalam masyarakat, melaksanakan kebijakan dengan program yang telah dibuat, serta mengoordinasikan kegiatan dalam lingkup jalan, jembatan dan prasarana jalan pada wilayah 1 dan wilayah 2, yang

mana wilayah 1 tersebut meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan kapas, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Malo, Kecamatan Dander dan Temayang. Adapun wilayah 2 meliputi Kecamatan Balen, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Kanor, Kecamatan Baureno, Kecamatan Kedungadem dan Kecamatan Sugihwaras.

4. Bidang Bina Marga II, didalam bidang ini terbagi menjadi 3 seksi untuk membantu, yaitu seksi jalan II, seksi jembatan II dan seksi prasarana jalan II. Adapun tugas pokok dari bidang bina marga II adalah merencanakan pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan perencanaan yang telah dibuat serta mengoordinasikan kegiatan dalam lingkup jalan, jembatan serta prasarana jalan pada wilayah III dan wilayah IV, yang mana wilayah III meliputi Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Gayam, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang serta Kecamatan Sekar. Selanjutnya wilayah IV meliputi Kecamatan Kadewan, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Ngraho, serta Kecamatan Margomulyo.
5. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, yang terdapat 3 seksi didalamnya, yaitu seksi tata ruang, seksi bina teknik serta jasa konstruksi dan juga seksi peralatan dan laboratorium. Adapun tugas dari bidang ini adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan perencanaan serta pemanfaatan pengendalian tata ruang, melaksanakan program-program kerja dalam hal konstruksi, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan di lingkup tata ruang dan jasa konstruksi.

6. UPTD, merupakan unsur atau penunjang teknis operasional tertentu, yang mana UPTD ini dipimpin oleh seorang kepala dan strukturnya berada dibawah kepala dinas yang bertanggung jawab melalui sekretaris. Tugas pokok dari UPTD ini adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Bina Marga dan penataan ruang sesuai dengan nomenklaturinya.

D. Implementasi Penerapan Pengembangan Kebijakan Program Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro

Dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pembangunan infrastruktur merupakan fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018-2023. Dalam pencapaian pembangunan yang telah menjadi visi misi pemerintah tersebut perlu adanya arah kebijakan dan strategi dalam mencapai visi tersebut. Kebijakan disini memiliki arti berupa arah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi sebagai dasar dalam menyusun program dan melakukan kegiatan pembangunan daerah.

Mengarah pada strategi misi ke 7 yang berbunyi “mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan”, yang mana instansi pemerintah untuk mengemban dan membuat kebijakan ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya (PKP Cipta Karya) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PU Bina Marga), dalam hal ini Dinas PKP Cipta Karya telah membuat beberapa kebijakan yang kemudian menghasilkan program dalam pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur sosial (berpengaruh dalam kondisi masyarakat semua) serta Dinas PU Karya yang telah

